

KRISIS EKONOMI 1998 : KRONOLOGI SAMPAI KEBIJAKAN**Andi Pratama Aji¹, Mazaya Hanifa Risanda², Michell Eka Septa³, Eko Ribawati⁴**

Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan

Ageng Tirtayasa, Jl. Raya Ciwaru No.25 Serang Banten, 42117

Email : 2288230040@untirta.ac.id, eko.ribawati@untirta.ac.id

ABSTRAK : Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak awal Juli 1997 dan berlangsung hampir dua tahun kemudian berubah menjadi krisis ekonomi, yang menyebabkan perlambatan ekonomi dengan lebih banyak perusahaan yang tutup dan lebih banyak pekerja yang menganggur. Krisis nilai tukar Indonesia tahun 1997/1998 menyebabkan penurunan nilai tukar yang sangat tajam, menambah beban utang luar negeri perusahaan swasta dan tingginya inflansi Indonesia. Memang, krisis moneter bukanlah satu-satunya faktor yang menyebabkan krisis ini secara keseluruhan. Banyak musibah nasional yang muncul secara bertubi-tubi di tengah tantangan ekonomi, seperti hama, kebakaran hutan besar-besaran di Kalimantan, kegagalan panen padi akibat musim kering yang panjang selama lima puluh tahun terakhir, dan kerusuhan yang melanda banyak kota pada pertengahan Mei 1998 lalu dan kelanjutannya.

Kata Kunci : Krisis, Ekonomi, Moneter

ABSTRACT : The monetary crisis that hit Indonesia since early July 1997 and lasted almost two years later turned into an economic crisis, which caused an economic slowdown with more companies closing and more workers becoming unemployed. The Indonesian exchange rate crisis in 1997/1998 caused a very sharp decline in the exchange rate, increasing the burden of foreign debt on private companies and high Indonesian inflation. Indeed, the monetary crisis was not the only factor that caused this overall crisis. Many national disasters have arisen repeatedly amidst economic challenges, such as pests, massive forest fires in Kalimantan, rice crop failure due to the long dry season over the last fifty years, and riots that hit many cities in mid-May 1998. and the continuation.

Keyword : Crisis, Economic, Monetary**PENDAHULUAN**

Salah satu ketakutannya negara di seluruh dunia adalah krisis ekonomi. Karena pemerintah dan masyarakat akan sama-sama mengalami kerugian jika hal itu terjadi. Krisis ekonomi adalah ketika ekonomi suatu negara menurun drastis. Secara umum, negara yang mengalami situasi ini akan mengalami penurunan PDB (produk domestik bruto), penurunan harga saham dan properti, dan peningkatan harga karena inflasi. Individu dengan pendapatan tetap atau tidak mengalami kenaikan pendapatan memiliki kecenderungan untuk mengurangi jumlah barang yang mereka beli sebagai akibat dari inflasi. Untuk mempertahankan sebagian pola konsumsi mereka, beberapa orang akan mengurangi tabungan dan investasinya, atau bahkan mencairkannya sama sekali. Karena kenaikan harga cenderung menurunkan output perekonomian, dampak inflasi cenderung buruk bagi perekonomian. Jika perekonomian diukur dengan harga konstan, pertumbuhan ekonomi akan menurun, dan hasilnya akan negatif. Negara-negara yang mengalami krisis juga akan melakukan hal yang sama: mereka akan mengurangi pengeluaran mereka, mengurangi utang mereka, dan meningkatkan tabungan mereka. Hampir semua tindakan yang dilakukan perusahaan dan masyarakat ketika menghadapi krisis memiliki kecenderungan untuk menurunkan output perekonomian. Sangat mungkin bahwa krisis ekonomi akan terjadi ketika sebagian besar masyarakat dan pebisnis mengira akan terjadi. Sejarah menunjukkan bahwa perekonomian sebuah negara telah dirusak secara negatif oleh berbagai krisis keuangan. Sejak pertengahan tahun 1990-an hingga tahun 2001, sejumlah negara mengalami krisis keuangan yang berbeda. Di Meksiko, krisis pertama kali terjadi pada tahun 1973–1982. Problem moneter dan fiskal menyebabkan krisis ini (Kaminsky, 2003). Ketidakseimbangan makroekonomi menyebabkan krisis generasi pertama, menurut Flood dan Garber (1984) dan Krugman (2007). Selain itu, sistem nilai tukar tetap dan defisit anggaran pemerintah dapat

menyebabkan krisis mata uang (Nezky, 2013). Namun, negara-negara Asia, termasuk Indonesia, mengalami krisis yang sangat parah pada tahun yang sama, bersamaan dengan bangkrutnya beberapa lembaga keuangan internasional, yang pada saat itu tampaknya sangat baik. Kejadian ini benar-benar mengerikan. Sebab, jika negara mengalami krisis ekonomi, banyak orang yang akan dirugikan. Penurunan belanja pemerintah biasanya diawali oleh gejala krisis ekonomi, di mana pengangguran melebihi 50% dari tenaga kerja. Selain itu, terjadi penurunan yang tidak terkontrol dalam nilai tukar, penurunan konsumsi yang lebih rendah, kenaikan harga pokok yang terus meningkat, dan penurunan yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, mengapa dasar suatu negara akan terpengaruh oleh krisis? Karena dampak yang diberikan sangat besar dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakatnya, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Penelitian ini akan melihat apa yang menyebabkan krisis seperti ini terjadi di Indonesia dan bagaimana mereka berdampak.

METODE

Heuristik adalah proses mencari dan menemukan sumber-sumber sejarah, melibatkan identifikasi dan pengumpulan sumber primer dan sekunder yang relevan untuk penelitian sejarah. Ini adalah langkah awal penting dalam membangun dasar analisis sejarah. Kritik sumber adalah evaluasi kritis terhadap sumber-sumber yang ditemukan selama fase heuristik. Ini melibatkan penilaian keandalan, keotentikan, dan keberpihakan sumber untuk memastikan penggunaan informasi yang paling dapat dipercaya. Interpretasi melibatkan analisis dan pemahaman informasi dari sumber-sumber sejarah. Sejarawan membentuk narasi atau pemahaman tentang peristiwa berdasarkan bukti yang ada, yang dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang masing-masing sejarawan. Historiografi adalah studi tentang penulisan sejarah, mencakup perkembangan cara pandang dan interpretasi masa lalu dari waktu ke waktu. Ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti ideologi, metodologi, dan tren akademik yang mempengaruhi pemahaman dan penulisan sejarah, membantu memahami konteks sosial, politik, dan intelektual dari karya-karya sejarah.

HASIL PENELITIAN

Kronologi Terjadinya Krisis Asia

Krisis Asia 1997-1998 dimulai di Thailand pada Juli 1997 ketika pemerintah terpaksa mengambang mata uangnya, baht, setelah upaya gagal untuk mempertahankannya terhadap serangan spekulatif. Ketidakmampuan pemerintah Thailand untuk mempertahankan nilai baht terhadap dolar AS menyebabkan devaluasi mata uang yang signifikan dan memicu serangkaian reaksi berantai di seluruh Asia Tenggara.

Menurut Radelet dan Sachs (1998), krisis ini dipicu oleh kombinasi faktor, termasuk defisit neraca berjalan yang tinggi, utang luar negeri yang besar, dan sektor perbankan yang lemah ("The Onset of the East Asian Financial Crisis," NBER Working Paper No. 6680). Thailand, sebagai negara pertama yang terjatuh, melihat baht jatuh lebih dari 20% dalam beberapa minggu pertama. Situasi ini diperparah oleh pelemahan ekonomi dan masalah keuangan yang tersembunyi di balik pertumbuhan ekonomi tinggi selama beberapa dekade sebelumnya.

Setelah Thailand, krisis dengan cepat menyebar ke negara-negara tetangganya. Di Indonesia, rupiah mengalami devaluasi yang dramatis, yang mengakibatkan inflasi tinggi dan ketidakstabilan politik yang memuncak dengan pengunduran diri Presiden Soeharto pada Mei 1998 (Hill, 1999, "The Indonesian Economy in Crisis: Causes, Consequences and Lessons," *The Australian Economic Review*). Korea Selatan juga mengalami krisis yang parah dengan mata uangnya, won, jatuh dan sejumlah besar perusahaan konglomerat mengalami kebangkrutan. Korea Selatan akhirnya harus meminta bantuan dari IMF dengan paket bailout yang besar.

Malaysia juga terkena dampak, dengan ringgit terdevaluasi dan pasar sahamnya mengalami penurunan tajam. Namun, berbeda dengan negara lain, Malaysia menolak paket bantuan IMF dan memilih untuk menerapkan kontrol modal untuk menstabilkan ekonominya (Kaplan & Rodrik, 2001, "Did the Malaysian Capital Controls Work?" NBER Working Paper No. 8142).

Krisis ini mengungkapkan kelemahan dalam struktur keuangan dan kelemahan dalam kebijakan ekonomi di banyak negara Asia. Para ekonom seperti Stiglitz (2002) berpendapat bahwa

salah satu penyebab utama krisis adalah liberalisasi keuangan yang terlalu cepat tanpa pengawasan yang memadai dan regulasi yang kuat ("Globalization and Its Discontents," W.W. Norton & Company).

Krisis Sampai Ke Indonesia

Krisis keuangan Asia 1997-1998 mencapai Indonesia melalui berbagai saluran ekonomi dan finansial yang terkait erat dengan ketidakstabilan regional. Salah satu faktor utama adalah devaluasi besar mata uang Thailand, baht, yang memicu spekulasi terhadap mata uang Asia lainnya, termasuk rupiah Indonesia. Ketika baht jatuh pada Juli 1997, para spekulan dan investor segera kehilangan kepercayaan terhadap ekonomi regional lainnya, menyebabkan penarikan modal besar-besaran dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Hill (1999) mencatat bahwa "saat investor mulai menarik modal mereka dari Thailand, mereka juga melihat kelemahan struktural di negara-negara Asia lainnya, termasuk Indonesia, yang memiliki masalah serupa dengan utang luar negeri yang besar dan defisit neraca berjalan" (Hill, "The Indonesian Economy in Crisis: Causes, Consequences and Lessons," *The Australian Economic Review*). Ketidakmampuan pemerintah Indonesia untuk mempertahankan nilai tukar rupiah menyebabkan devaluasi yang tajam, memperparah masalah ekonomi domestik.

Selain itu, banyak perusahaan Indonesia memiliki utang dalam dolar AS. Ketika rupiah terdevaluasi, beban utang dalam mata uang asing ini meningkat secara signifikan, menyebabkan banyak perusahaan bangkrut. Radelet dan Sachs (1998) menyoroti bahwa "hutang luar negeri sektor swasta yang besar memperburuk krisis di Indonesia, karena perusahaan-perusahaan yang sebelumnya dianggap solvent tiba-tiba menjadi bangkrut akibat beban utang yang melonjak" (Radelet & Sachs, "The Onset of the East Asian Financial Crisis," NBER Working Paper No. 6680).

Krisis ini juga mengakibatkan inflasi tinggi dan pengangguran, yang kemudian memicu ketidakstabilan sosial dan politik. Ketidakpuasan publik terhadap situasi ekonomi yang memburuk menyebabkan protes massal dan akhirnya pengunduran diri Presiden Soeharto pada Mei 1998 setelah 32 tahun berkuasa (Bresnan, 2005, "Indonesia: The Great Transition," Rowman & Littlefield Publishers). Krisis ini memperlihatkan kelemahan mendasar dalam struktur ekonomi dan politik Indonesia, yang sebelumnya terselubung di balik pertumbuhan ekonomi yang kuat.

Dampak Krisis Moneter

Krisis moneter Asia 1997-1998 memiliki dampak yang luas dan mendalam pada negara-negara terdampak, termasuk Indonesia. Dampaknya meluas dari sektor keuangan ke berbagai aspek ekonomi, sosial, dan politik.

Dari sisi ekonomi, krisis ini menyebabkan kontraksi besar dalam pertumbuhan ekonomi. Hill (1999) mencatat bahwa "Indonesia mengalami penurunan PDB yang signifikan, dengan ekonomi menyusut lebih dari 13% pada tahun 1998" (Hill, "The Indonesian Economy in Crisis: Causes, Consequences and Lessons," *The Australian Economic Review*). Penurunan ini disebabkan oleh devaluasi tajam rupiah yang meningkatkan beban utang luar negeri dan mengurangi kemampuan impor bahan baku serta barang modal.

Sektor keuangan juga terdampak parah, dengan banyak bank dan perusahaan bangkrut akibat ketidakmampuan membayar utang dalam mata uang asing. Radelet dan Sachs (1998) menyatakan bahwa "ketidakstabilan perbankan dan meningkatnya kredit bermasalah menyebabkan keruntuhan sistem perbankan di beberapa negara Asia, termasuk Indonesia" (Radelet & Sachs, "The Onset of the East Asian Financial Crisis," NBER Working Paper No. 6680). Krisis perbankan ini memaksa pemerintah melakukan restrukturisasi besar-besaran di sektor perbankan dan menyediakan paket penyelamatan yang mahal.

Dari sisi sosial dan politik, dampaknya sangat signifikan. Tingginya inflasi dan pengangguran memicu ketidakpuasan publik yang meluas. Bresnan (2005) mencatat bahwa "krisis ini mengakibatkan kerusakan sosial yang meluas, yang berpuncak pada pengunduran diri Presiden

Soeharto setelah 32 tahun berkuasa" (Bresnan, "Indonesia: The Great Transition," Rowman & Littlefield Publishers). Ketidakstabilan ini menyebabkan perubahan besar dalam lanskap politik Indonesia, termasuk transisi menuju demokrasi yang lebih terbuka.

Dampak sosial lainnya termasuk peningkatan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Stiglitz (2002) berpendapat bahwa "krisis ini menyebabkan penurunan drastis dalam standar hidup bagi banyak orang di Asia, dengan jutaan orang jatuh ke dalam kemiskinan" (Stiglitz, "Globalization and Its Discontents," W.W. Norton & Company). Banyak rumah tangga yang sebelumnya berada di kelas menengah jatuh ke dalam kemiskinan akibat kehilangan pekerjaan dan kenaikan harga barang kebutuhan pokok.

Kebijakan dan Bantuan Asing

Selama krisis moneter Asia 1997-1998, berbagai kebijakan dan bantuan asing diterapkan untuk menstabilkan ekonomi negara-negara terdampak, termasuk Indonesia. Kebijakan-kebijakan ini dan bantuan internasional memainkan peran penting dalam pemulihan ekonomi.

Indonesia, yang terkena dampak paling parah, mengadopsi berbagai langkah kebijakan untuk menstabilkan ekonomi. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mendapatkan paket bantuan besar yang mencakup reformasi struktural. Hill (1999) mencatat bahwa paket IMF untuk Indonesia mencakup kebijakan moneter dan fiskal yang ketat, reformasi sektor perbankan, dan privatisasi perusahaan milik negara (Hill, "The Indonesian Economy in Crisis: Causes, Consequences and Lessons," *The Australian Economic Review*). Reformasi ini bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan pasar dan memperbaiki struktur ekonomi yang lemah.

Selain itu, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan untuk memperbaiki sistem perbankan yang lemah. Radelet dan Sachs (1998) menunjukkan bahwa restrukturisasi perbankan menjadi prioritas utama, termasuk penutupan bank-bank yang bermasalah dan penyehatan kembali bank-bank yang masih beroperasi (Radelet & Sachs, "The Onset of the East Asian Financial Crisis," NBER Working Paper No. 6680). Langkah-langkah ini mencakup rekapitalisasi bank dan pembentukan badan penyehatan perbankan untuk menangani kredit bermasalah.

Malaysia, di sisi lain, mengambil pendekatan berbeda dengan menolak bantuan IMF dan menerapkan kontrol modal yang ketat. Kaplan dan Rodrik (2001) mencatat bahwa Malaysia menerapkan kontrol modal untuk mencegah keluarnya modal besar-besaran dan menstabilkan nilai tukar ringgit (Kaplan & Rodrik, "Did the Malaysian Capital Controls Work?" NBER Working Paper No. 8142). Langkah ini mencakup pembatasan terhadap transaksi mata uang asing dan pembatasan terhadap transfer modal keluar.

Bantuan dari negara-negara maju juga memainkan peran penting dalam proses pemulihan di tingkat regional. Jepang, misalnya, meluncurkan Inisiatif Miyazawa yang menyediakan dana untuk membantu negara-negara Asia yang terdampak krisis. Stiglitz (2002) mencatat bahwa Inisiatif Miyazawa adalah langkah penting dalam memberikan dukungan finansial dan membantu stabilisasi ekonomi di Asia (Stiglitz, "Globalization and Its Discontents," W.W. Norton & Company). Bantuan ini mencakup dana untuk restrukturisasi utang dan pinjaman jangka pendek untuk menstabilkan pasar keuangan.

KESIMPULAN

Krisis ekonomi 1998 merupakan salah satu peristiwa yang memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Krisis tersebut bermula dari gejolak nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti defisit transaksi berjalan yang besar, utang luar negeri swasta yang tinggi, serta fundamental ekonomi yang rapuh. Pemerintah pada saat itu mengambil berbagai kebijakan untuk mengatasi krisis, seperti program rekapitalisasi perbankan, restrukturisasi utang, dan reformasi struktural. Meskipun upaya-upaya tersebut dilakukan, krisis terus berkepanjangan dan berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah, tingginya inflasi, meningkatnya pengangguran, serta penurunan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Krisis ini juga memicu terjadinya gejolak sosial dan politik yang cukup masif di Indonesia. Berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi, baik itu dari faktor eksternal maupun faktor internal.

Indonesia memiliki banyak keberuntungan dari resesi ini sehingga efek dari resesi global ini tidak terlalu besar dibanding negara emerging market lainnya karena Indonesia tidak terlalu menggantungkan ekonominya di ekspor, kedua sektor perbankan maupun sektor finansial tidak terlalu mengalami dampak yang seberat negara lainnya, ketiga bursa yang mengalami penurunan tidak terlalu berpengaruh pada ekonomi Indonesia karena pelaku pasar saham hanyalah 0,5% dari penduduk Indonesia, dan terakhir Indonesia dapat dikatakan sebagai self sustainability economy karena potensi pasar domestik yang sangat besar sehingga walaupun pasar luar negeri lemah namun pasar domestiknya sudah sangat besar. Akan tetapi meskipun Indonesia memegang keberuntungan diatas, imbas krisis global tersebut pada pengangguran dan kemiskinan tidak dapat sepenuhnya dihindari. Pelajaran penting yang dapat dipetik dari peristiwa ini adalah perlunya menjaga fundamental ekonomi yang kuat, mengelola utang luar negeri dengan bijak, serta memperkuat sektor perbankan dan keuangan. Selain itu, transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik juga menjadi faktor krusial untuk mencegah terjadinya krisis serupa di masa mendatang. Krisis ekonomi 1998 meninggalkan dampak yang cukup besar bagi Indonesia, namun dapat menjadi pelajaran berharga dalam membangun perekonomian yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Hill, H. (1999). *The Indonesian Economy in Crisis: Causes, Consequences and Lessons*. The Australian Economic Review.

Kaplan, E., & Rodrik, D. (2001). *Did the Malaysian Capital Controls Work?* NBER Working Paper No. 8142.

Radelet, S., & Sachs, J. (1998). *The Onset of the East Asian Financial Crisis*. NBER Working Paper No. 6680.

Stiglitz, J. E. (2002). *Globalization and Its Discontents*. W.W. Norton & Company.

Bresnan, J. (2005). *Indonesia: The Great Transition*. Rowman & Littlefield Publishers.